

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dari sektor pertanian, oleh karena itu pembangunan di sektor pertanian perlu mendapat perhatian dari pemerintah supaya pertanian di Indonesia bisa menjadi sektor utama yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Pembangunan di sektor pertanian diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja, penyedia bahan baku industri, mengatasi kemiskinan dan perbaikan SDM pertanian (Syam, 2012)

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sektor pertanian adalah pemerintah membuat program pembangunan pertanian atau disebut sebagai pembangun ekonomi di sektor pertanian, dikarenakan pertanian merupakan sektor utama dalam kehidupan ekonomi. Pembangunan pertanian tidak hanya dapat dipandang dari segi ekonominya saja namun terdapat juga aspek sosial kelembagaan, teknologi dan masih banyak aspek-aspek lainnya (Adi, 2022).

Padi di Indonesia merupakan salah satu komoditas subsektor tanaman pangan serta memiliki posisi penting karena merupakan makanan pokok masyarakat. Tingginya jumlah penduduk yang mengonsumsi beras disebabkan anggapan masyarakat bahwa beras tidak dapat digantikan dengan bahan makanan yang lain. Beras mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap ekonomi dan politik di Indonesia (Purnamaningsih, 2006).

Pertanian memiliki kontribusi penting baik terhadap perekonomian maupun pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa meskipun konsumsi per kapita mempunyai kecenderungan menurun, namun jumlah penduduk semakin bertambah sehingga total konsumsi beras semakin meningkat setiap tahun.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Konsumsi Beras di Indonesia Tahun 2011 - 2022

Tahun	Jumlah penduduk (ribu jiwa)	Konsumsi beras	
		(kg/kapita/tahun)	kg/tahun
2011	241 990,50	102,866	24.892.595
2012	245 425,20	97,646	23.964.789
2013	248 818,10	97,405	24.236.127
2014	252 164,80	97,233	24.518.740
2015	255 461,70	98,353	25.125.425
2016	258 690,00	100,571	26.016.712
2017	261 890,90	97,641	25.571.289
2018	265 015,30	96,563	25.590.672
2019	268 074,60	94,473	25.325.812
2020	270 203,90	94,018	25.404.030
2021	272 682,50	94,382 ^{*)}	25.736.320
2022	275 773,80	93,949 ^{*)}	25.908.673

Keterangan: ^{*)} Prediksi Pusdatin dengan model trend linier (MAPE=1,28991)

Sumber: Kementan (2021).

Upaya dalam mewujudkan pembangunan pertanian yaitu, pemerintah mempunyai tiga program dalam peningkatan kesejahteraan petani. Tiga program tersebut antara lain, penyediaan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Gerakan Tiga Kali Ekspor (Grati Eks) dan pembentukan Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostra Tani). Untuk Kostra Tani membantu petani di desa dalam meningkatkan produksi panen dan memperbaiki SDM petani dengan cara dibimbing oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). PPL merupakan orang yang dapat mendidik petani beserta keluarganya secara nonformal yang meliputi kegiatan penyaluran ilmu pengetahuan dan keterampilan yang melalui proses belajar mengajar. Seorang PPL harus ahli dalam bidang pertanian serta kompeten, ditambah dapat berkomunikasi secara efektif dengan petani di lapangan sehingga dapat memotivasi minat belajar para petani dan berorientasi pada masalah yang dihadapi petani dilapangan (Mardikanto, 2009).

Tujuan adanya PPL adalah membantu proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memperdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif untuk mendapatkan perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi merealisasikan kehidupan yang

berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera serta berkelanjutan (Mardikanto, 2008).

PPL memiliki banyak peran yaitu sebagai edukator, inovator, fasilitator, konsultan, pembinaan, evaluator dan dinamisator. Peran PPL untuk memperdayakan petani dalam meningkatkan produksi secara maksimal guna meningkatkan keuntungan petani. PPL juga memberikan bimbingan kepada kelompok tani dengan cara mengadakan pertemuan-pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh kelompok tani (Nurjanah, S. *et al*, 2016).

Dalam pembangunan pertanian, program penyuluhan yang diadakan di desa-desa merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian lainnya untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor: 520/2017, BPP adalah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan, merupakan suatu unit kerja non struktural memiliki peran dalam pusat koordinasi, pusat data dan informasi pertanian kemitraan usahatani. Selain itu BPP juga harus mampu mengawal program pembangunan di kecamatan (Berlian, 2014).

Program yang diselenggarakan oleh PPL merupakan media dalam pembelajaran untuk pengorganisasikan dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya. Sebagai kegiatan pendidikan, PPL membantu menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif bagi petani dan keluarganya serta pelaku usaha (Deptan, 2009).

Berjalannya program penyuluhan yang terdapat di desa dapat membantu menciptakan sesuatu yang baru meliputi pertanian organik dan pertanian sehat. Pertanian organik adalah suatu metode pertanian yang mendorong tanaman dan tanah tetap sehat melalui cara pengolahan tanah dan tanaman yang disyaratkan dengan pemanfaatan bahan-bahan organik atau alamiah sebagai input dan menghindari penggunaan pupuk buatan atau kimia dan pestisida kecuali untuk bahan-bahan yang diperkenankan (IASA, 1990). Sedangkan pertanian sehat adalah suatu metode pertanian yang mendorong tanaman dan tanah tetap sehat tanpa adanya campuran bahan-bahan kimia dalam semua aspek baik dari pengolahan

tanah, perawatan, pupuk dan pestisida dikatakan pertanian sehat karena belum terdapat sertifikat organik dan lahan yang ada disekitar tempat penanaman masih ada yang menggunakan bahan kimia sehingga air yang mengalir dari tanah sekitar terdapat kandungan kimia yang membuat tanaman tidak benar-benar dikatakan dengan organik. Sistem pertanian yang menggunakan bahan-bahan organik sebagai salah satu masukan yang berfungsi sebagai perbaikan tanah yang sudah rusak. Tanaman sehat cenderung lebih baik dalam mengatasi serangan hama dan penyakit dengan mempercepat pertumbuhan dengan bentuk pertahanan dari dalam tumbuhan sendiri (Untung, 2006).

Upaya PPL dalam membuat pertanian yang sehat memiliki beberapa kendala, salah satunya tidak semua petani dapat menerapkan sistem pertanian sehat terkadang ada pula petani yang masih menggunakan metode pertanian konvensional. Pertanian anorganik atau yang biasanya disebut pertanian konvensional yang merupakan seluruh kegiatan pertaniannya menggantungkan input produksi dari bahan-bahan kimia. Pertanian anorganik merupakan metode pertanian yang menggunakan bahan anorganik misalnya pestisida kimia, dan pupuk kimia. Pertanian anorganik dapat memberikan hasil panen yang tinggi namun memiliki dampak negatif terhadap lingkungan sekitar tanah pertanian. Hasil produksi pertanian anorganik juga dapat membahayakan kesehatan manusia yang merupakan akibat penggunaan pestisida kimia (Adi, 2022).

Pertanian konvensional sangat menggantungkan tanamnya kepada pupuk dan pestisida kimia yang sifatnya mampu membantu para petani dalam percepatan panen serta perlindungan tanaman dan menghasilkan produksi tinggi. Berdasar harganya ada dua jenis pupuk, yaitu pupuk bersubsidi dan non subsidi. Pupuk subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Harga pupuk subsidi berdasar Harga Eceran Tertinggi (HET), namun jumlah pemebelannya dibatasi sesuai dosis anjuran pemerintah dan harus dilakukan melalui kelompok tani. Jenis subsidi pupuk yang dijalankan selama ini adalah subsidi harga atau subsidi tidak langsung dimana alokasi pupuk subsidi yang telah diusulkan oleh pemerintah. Keuntungan dari kebijakan subsidi pupuk secara langsung adalah harga pupuk untuk suatu jenis pupuk di pasar hanya satu macam sehingga potensi

terjadinya penyelewengan dalam masalah persediaan pupuk yang disebabkan oleh dualisme harga dapat diminimalisir, mekasisem distribusi akan lebih sederhana dan lebih dirasakan oleh petani karena subsidi pupuk dapat diterima secara langsung (Ikbal, 2017). Pupuk non subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya tidak mendapat subsidi dari pemerintah atau diluar program pemerintah, sehingga harganya lebih mahal dan keberadaannya di pasar saat ini relatif mudah diperoleh. Pupuk non subsidi dapat dibeli sesuai kebutuhan luas lahan dalam jumlah yang tidak dibatasi dalam pembeliannya (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/MPP/Kep/2/2003).

Berdasarkan kondisi tersebut terdapat permasalahan yaitu keterbatasannya pupuk subsidi di kalangan petani, maka PPL berperan untuk membantu petani mengatasi keterbatasan pupuk dengan alternatif penggunaan pupuk organik dengan media kotoran kambing sebagai pupuk dasar pada tanah. dilanjutkan dengan pemberian pupuk organik *Plant Growth Promoting Rhizobacteria* (PGPR) yang merupakan hasil dari sekolah lapang yang diberikan oleh PPL serta Pupuk Organik Cair (POC). Keterbatasan pupuk dipasaran juga membantu peran PPL untuk memperbaiki tanah yang sudah rusak diakibatkan oleh penggunaan pupuk kimia yang berlebih sehingga membuat kandungan N didalam tanah menjadi tinggi dan membuat tanaman yang ditanamai menjadi tidak sehat kembali. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengetahui upaya PPL dalam mengatasi keterbatasan pupuk bersubsidi, bagaimana tingkat kepuasan petani terhadap kinerja PPL, serta korelasi antar tingkat kepuasan yang telah diberikan oleh PPL dengan produktivitas yang dicapai.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan PPL dan petani dalam mengatasi pengurangan pupuk bersubsidi di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana tingkat kepuasan petani terhadap kinerja PPL di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember ?
3. Bagaimana korelasi antara tingkat kepuasan petani dengan produktivitas tanaman ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PPL dan Petani dalam mengatasi pengurangan pupuk bersubsidi di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui tingkat kepuasan petani terhadap kinerja PPL Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui korelasi antara tingkat kepuasan petani dengan produktivitas tanaman.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi, atau masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu antara lain:

1. Menambah khasanah Ilmu pengetahuan dibidang sosial ekonomi pertanian.
2. Sebagai informasi bagi petani dalam penerapan budidaya tanaman padi sehat.
3. Sebagai acuan untuk pemerintah dalam pembuatan kebijakan-kebijakan di dalam usahatani padi umumnya, dan masalah pupuk bersubsidi khususnya.